

TAJUK RENCANA

Menikmati Keindahan, Melestarikan Candi Borobudur

UPAYA menjaga dan pelestarian Candi Borobudur terus diupayakan. Lama tidak menerima kunjungan akibat pandemi Covid-19, bukan berarti kegiatan menjadi vacuum. Pelbagai upaya manajemen kunjungan terus dipikirkan, pascapolemik tiket naik yang melonjak dan kini sudah dibatalkan.

Perlahan tetapi pasti, upaya tersebut kemudian diawali dengan Kajian Lapangan Tertutup Kunjungan Naik Candi Borobudur untuk umum, awal Maret ini. Tampaknya, hasil Kajian Lapangan Tertutup cukup menggoda masyarakat untuk mengunjungi candi yang disebut memiliki 505 arca Buddha. Antusiasme tinggi apalagi pengunjung sudah didukung konsep dan implemetasi layanan operasional dengan manajemen baru.

Jeda seminggu, kegiatan dilanjutkan dengan Kajian Lapangan Terbuka Kunjungan Naik Monumen Candi Borobudur untuk Umum. Kegiatan kian menggoda hasrat warga untuk mengikutinya. Apalagi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT TWC) mengakselerasi layanan berbasis digital dan *thematic tour* untuk mewujudkan *excellent service* menuju pariwisata berkualitas (KR, 24/3).

Kajian lapangan yang dilaksanakan dengan tujuan memastikan kesiapan layanan dan sistem bisa berjalan dengan baik, adalah prioritas. Salah satu layanan berbasis digital yang sudah diterapkan adalah pembelian tiket secara online maupun akses masuk ke luar wisatawan. Sistem yang sangat membantu mengatur kuota kunjungan baik di atas monumen ataupun kepadatan pengunjung. Itulah alasan mengapa dalam kajian lapangan jumlah pengunjung pun dibatasi dan naik secara bertahap, mulai 400 orang, kemudian 800 orang dan sampai 1.200 orang.

Adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang melakukan Kajian Carrying Capacity lewat Balai Konservasi

Borobudur, untuk tujuan konservasi pelestarian candi. Direktur Utama PT TWC Febrina Intan menjelaskan, dalam pelaksanaan mendatang, TWC mulai menerapkan kuota kunjungan naik monumen Candi Borobudur sesuai kajian *carrying capacity*, yaitu 1.200 orang per hari. Kunjungan tersebut akan terbagi dalam delapan jam sesi. Artinya, dengan jumlah kuota per sesi sejumlah 150 orang. Tentu keindahan candi akan lebih dapat dinikmati.

"Mengingat program ini merupakan pola perjalanan wisata baru yang sarat dengan *value added experience*. Melalui kajian lapangan tertutup ini, sekaligus kami menerima masukan-masukan dari pengunjung dari berbagai sisi demi perbaikan kualitas layanan ke depannya," terang Febrina, seperti dilansir Antara.

Artinya, aspek edukasi adalah tujuan utama, sehingga kunjungan menikmati keindahan Candi Borobudur lebih bermakna. Dengan pendampingan guide PT TWC, pengunjung juga akan mendapatkan ilmu. Ini akan sangat mengedukasi pengunjung karena banyak sekali pesan-adiluhung dalam relief candi bisa disampaikan. Akan banyak falsafah kehidupan yang bisa dicari benang merahnya dengan kehidupan masa kini. Apalagi dalam laman beritamagelang.id disebutkan, Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief dimana 1.460 panel relief naratif dan 1.212 panel relief dekoratif.

Candi Borobudur bukan hanya kebanggaan Bangsa Indonesia. Ironisnya, ancaman bukan hanya dari pengunjung namun juga alam. Karenanya mahakarya adiluhung karya abad ke-8 ini harus dirawat, dijaga dan dilestarikan. Ketika menuju era pariwisata berkualitas menjadi trend maka membatasi jumlah pengunjung dan menceritakan pesan-adiluhung dalam relief menjadi strategi cerdas. Karena dua target terjalani. Melestarikan fisik candi serta melestarikan ajaran kebaikan dengan nilai filosofi tinggi. □-d

Siapa Menutup Lubang Dana Pendidikan?

SALAH satu persoalan di DIY yang selama ini tidak kunjung menemukan pemecahannya adalah bagaimana mendanai pendidikan di tingkat menengah atas. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahragra (Disdikpora) DIY, Suci Rohmadi, memaparkan besaran kekurangan dana operasional sekolah menengah atas yang mencapai kisaran Rp 225M (34%).

Sebagai ilustrasi, total anggaran untuk biaya operasional sekolah pada tahun 2022 mencapai Rp 761,25M. Pihak pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 506M (66%) untuk biaya operasional sekolah, melalui mekanisme BOSNas dan BOSDa. Siapa yang akan menanggung besaran biaya tersebut?

Pelanggaran HAM

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan pemerintah terwujud dalam alokasi anggaran (i.e. minimal 20% dari APBN dan APBD). Ini adalah alternatif pertama: pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan. Di satu sisi, pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan. Kegagalan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan diartikan sebagai bukti pelanggaran HAM -terlebih karena hak memperoleh pendidikan masuk kategori sebagai hak azasi manusia.

Di lain pihak, besaran alokasi dana dari APBN dan APBD tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan. Ini terbukti dengan besarnya minus pendanaan pendidikan di DIY (Rp 255M) di tahun 2022 tersebut. Alternatif pertama untuk pemenuhan biaya operasional pendidikan belum bisa memenuhi.

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada ideologi Pancasila, prinsip dasar gotong-royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat, sudah semestinya menjadi landasan untuk membangun komunikasi demi kesepahaman. Mengacu

Markus Budiraharjo

UU Sisdiknas, sumber pendanaan pendidikan juga bisa berasal dari masyarakat. Dalam implementasinya, pendanaan pendidikan dari masyarakat terbagi ke dalam dua kategori: (a) sumbangan dari pelaku bisnis/industri (Corporate Social Responsibility/CSR) dan (b) dana dari orang tua.



KR-JOKO SANTOSO

Sejauh mana dana CSR memenuhi kebutuhan untuk memenuhi dana operasional? Berdasarkan pengalaman riil di sekolah-sekolah DIY, partisipasi perusahaan dalam mekanisme CSR sangat minim. DIY bukan merupakan kawasan industri yang memungkinkan sumbangan CSR bagi sekolah-sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah: sejauh mana para orang tua bisa berperan untuk berkontribusi di dalam memenuhi kebutuhan operasional?

Ditanggung Orang Tua

Kekurangan dana sebesar Rp 255M sebenarnya bisa dipenuhi orang tua. Ketika dibagi sama rata untuk 150.000 siswa menengah atas di DIY, akan diperoleh angka Rp 1,7 juta/persiswa/tahun. Setiap orang tua ikut menanggung Rp 142.000/bulannya. Dengan 66% biaya operasional yang sudah ditanggung pe-

merintah, pertanyaan reflektif bagi para orang tua adalah: sejauh mana orang tua berkenan untuk untuk berpartisipasi di dalam pemenuhan kebutuhan operasional sekolah?

Kesediaan orang tua untuk berperan aktif di dalam mendukung pendidikan anak-anak menjadi sangat krusial. Sama seperti adagium *jer basuki mawa beya* - untuk memperoleh kemuliaan, kesejahteraan, dan keberhasilan, dibutuhkan modal dan biaya. Yuval Noah Harari, salah satu penulis paling berpengaruh terkait dengan peradaban manusia, mengingatkan: investasi yang paling menjanjikan untuk masa depan yang semakin tidak pasti adalah 'membeli pengalaman'.

Sangat mendesak bagi sekolah-sekolah menengah atas untuk menyediakan berbagai pengalaman belajar yang mengembangkan kepekaan sosial (melalui kolaborasi) dan literasi dan numerasi tingkat lanjut (melalui pembelajaran berbasis persoalan, riset, presentasi, dan publikasi - sejauh memungkinkan). Tanpa ada dukungan dana operasional yang cukup, tidak pernah ada kegiatan-kegiatan yang mendorong kreativitas, merangsang keterampilan berpikir kritis dan eksploratif, dan menggerakkan kemampuan kolaboratif.

Sejauh mana orang tua berkenan untuk untuk berpartisipasi di dalam pemenuhan kebutuhan operasional sekolah? □-d

*) **Markus Budiraharjo EdM EDD**, Dosen senior Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Gaya Hedon dan Pelajaran dari 'Takatsur'

SOSIOLOG Jean P Baudrillard (2004) memahami, sikap hedonis melekat pada diri setiap manusia yang berkarakter sebagai *homo economicus*. Senang mengoleksi harta dan belanja non-esensial atau asesori-asesori mewah dan eksklusif, serta memamerkan ke orang lain. Sementara, Alquran membahas secara khusus soal ini, dalam surat ke-102 (At) Takatsur atau bermegah-megahan.

Para mufasir berpendapat, surat (At) Takatsur berkaitan dengan perilaku warga Bani Haritsah dan Bani Haris (abad 6 M), klan suku Quraisy Makkah. Kegemarannya, mengoleksi harta dan memamerkannya. Ayat 1-2 surat tersebut menjelaskan, *berbanga-bangga (bermegah-megahan) dalam memperbanyak harta telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur (ingin ikut mengubur hartanya)*.

Kasus lain dalam Alquran ialah Qarun bin Yashar bin Qahit, dan tiranis Fir'aun (Ramses II). Alquran menarasikan Qarun pada surat ke-28/Alqashash, ke-29/Al'Ankabut, ke-23/Almukminun. Sedang Fir'aun dinarasikan 70 kali. Profesi mereka bisnis (perdagangan). Problemanya, mereka makin kaya makin hedon dan tiran. Religiusitasnya terkikis.

Perilaku Hedon

Publik Indonesia sedang menonton perilaku hedon kekinian. Aparatus negara di instansi-ebasah' pemerintah. Mereka membelanjakan harta untuk kemewahan, eksklusivitas. Koleksi mereka diposting di media sosial untuk menandakan eksistensinya. Apabila harta orang-orang tajir masa lalu dari hasil bisnis (perdagangan), sedangkan harta para aparaturnegara itu, diduga dari hasil memberdayakan jabatan mereka. Perbedaan sumber harta kekayaan itu menjadi poin krusial tentang etika aparaturnegara.

Apakah itu berarti pejabat dan aparaturnegara

Mukhijab

negara tidak boleh kaya? Mereka boleh kaya. Instansi pemerintah saja mendorong mereka kaya, dengan program remunerasi atau pendapatan di luar gaji normatif karyawan reguler Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 mengatur tentang aparat BLU seperti pajak, imigrasi, lembaga pendidikan berstatus BLU, mendapat remunerasi atau gaji tunggal (*single salary*) berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan bonus. Tujuannya, gaji karyawan tinggi, implikasinya kinerja pelayanan publik super baik, bersih dari korupsi.

Apakah orang makin kaya makin unggul perilakunya? Berkaca pada Qarun, sepupu Nabi Musa. Mengawali hidup berumah tangga dalam kondisi miskin sekaligus banyak anak. Qarun minta Musa mendoakan agar dirinya bisa makmur. Lalu, dia menekuni dagang, dan kuasa Tuhan berpihak padanya. Ketika makin kaya, dia bertolak punggung dari Nabi Musa. Bahkan kufur, makin haus kekayaan, dan takut melarat lagi.

Aparatus negara yang menerima remunerasi, akumulasi hartanya lebih besar. Idealnya, makin makin tajir yang makin moncer kinerjanya dan bersih dari korupsi. Kasus mantan pegawai pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RAT dan pejabat lain yang uangnya berjibun mencerminkan level jabatan identic level kekayaan. Renumentasi makin memotivasi bagaimana memberdayakan karir untuk meraup kekayaan. Renumerasi bukan

mendorong *semeleh*.

Ilusi Kenikmatan

Kekayaan itu mendorong meraih kesenangan dan kebahagiaan, dengan koleksi produk-produk asesori eksklusif. Targetnya, kata sosiolog Prancis Baudrillard, menciptakan ilusi kenikmatan. Senang sendiri, sebaliknya bebal dengan problem-problem social di sekitarnya.

Aparat hukum menjamah mereka, diusut hartanya, dari mana asalnya. Alquran mengisahkan, ketika Qarun ditanya asal hartanya, jawaban dia, "(harta itu) semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Suatu hari takdir menyimpannya, "Allah membenamkan Qarun, dan hartanya ke dalam bumi (QS Alqashash (28): 78 dan 81). Bagaimana kelak mereka yang sedang bermasalah itu akan menjawab saat penyidik menanyakan asal harta mereka? □-d

*) **Dr Mukhijab**, Dosen Prodi Sosiologi Universitas Widya Mataram

Pojok KR

Calon jemaah haji sudah berhak lunasi biaya haji 2023.

-- Ayo laksanakan, penuh panggilanNya ke tanah suci.

Bawaslu imbau tak manfaatkan momen Ramadan untuk berkampanye.

-- Lupakan peribahasa sekali merengkuh dayung...

Pejabat negara dilarang gelar bukber. -- Kalau nonton konser boleh.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Menata Malioboro Kian Memesona

MALIOBORO bak putri cantik yang tidak henti bersolek. Pelbagai upaya dilakukan untuk membenahi agar sepenggal jalan — yang kini ditiru di banyak kota — itu tampil kian cantik dan memesona. Bahkan keberadaan music angklung yang di Yogyakarta sangat banyak di simpang empat, tidak bisa tampil sembarangan di Malioboro.

Sebagaimana PKL, music angklung juga ditempatkan di dua lokasi Teras Malioboro 1 dan 2. Namun tidak semua bisa masuk. Karena untuk bisa tampil di kawasan tersebut kelompok tersebut akan diakurasi. Sementara, nanti jadwal pentasnya juga diatur.

Agaknya, upaya membuat dan menata Malioboro kian memesona memang *all out* dilakukan.

Karena ini memang Penataan Malioboro. Namun ya hanya sepenggal itu saja, mulai Selatan Rel KA Stasiun Tugu hingga titik nol. Meski merupakan satu jalur konsep Sumbu Filosofi, situasi di Utara Rel Stasiun Tugu sudah sangat berbeda. Kakilima kalau sore hari masih ramai. Sementara kursi-kursi santai duduk di trotoar yang rusak juga terbiarkan saja tampaknya. Belum ada upaya memperbaiki juga.

Padahal kalau Penataan Malioboro disatukan dengan Penataan Kawasan Sumbu Filosofi, tentu akan kian memperindah Yogya. Sehingga dari Jl Sudirman ke Barat sampai Tugu Putih dan belok ke Selatan, semuanya indah. □-d

*) *Indah, Wonocatur Banguntapan Bantul*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP